

PENYUSUNAN RDTR BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN PERKOTAAN

**Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.
BIMTEK PENYUSUNAN RDTR KABUPATEN/KOTA
PROVINSI LAMPUNG
Bandarlampung, 9 Oktober 2017**

Curriculum Vitae

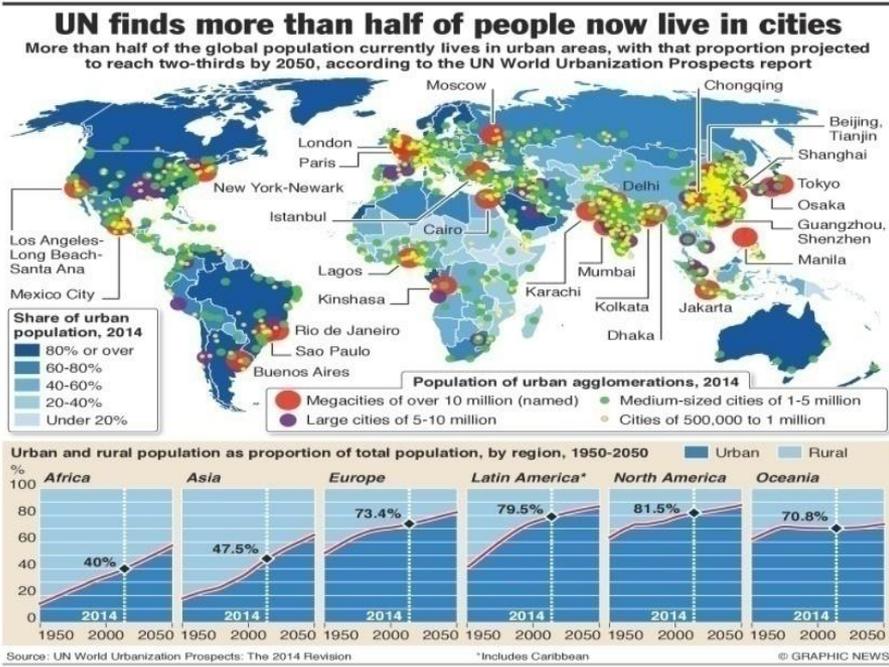
- Nama : **Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.**
- Pendidikan:
 - S1: Perencanaan Wilayah dan Kota ITB (1994)
 - S2: Tourism Planning and Develepoment, University of Surrey, Guilford, UK (1998)
 - S3: Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB (2015)
- **Pekerjaan: Dosen Fakultas Teknik UNILA dan Koordinator Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA**
- Organisasi :
 - Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Lampung
 - Ketua PW HIMPAUDI Provinsi Lampung
 - Komisi Pariwisata Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Lampung
- **Motto: Hiduplah dari imajinasi Anda, bukan sejarah Anda (Stephen Covey)**

OUTLINE

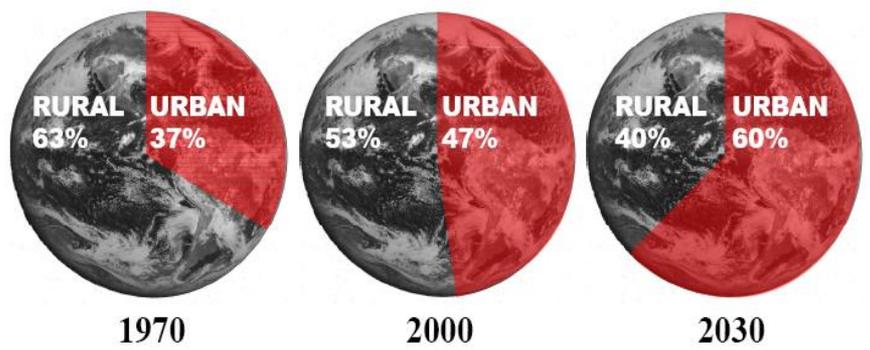
1. Tantangan, Masalah dan Dampak Pembangunan perkotaan
2. Penyusunan RDTR dan Perkembangan Perkotaan (Lampung)
3. Pembangunan Kota Berkelanjutan



PENDAHULUAN

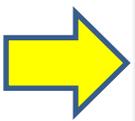


Global Population: Rural / Urban



52,03 %
 Penduduk Indonesia
 sekarang tinggal di
 perkotaan (2015)

08/10/2017

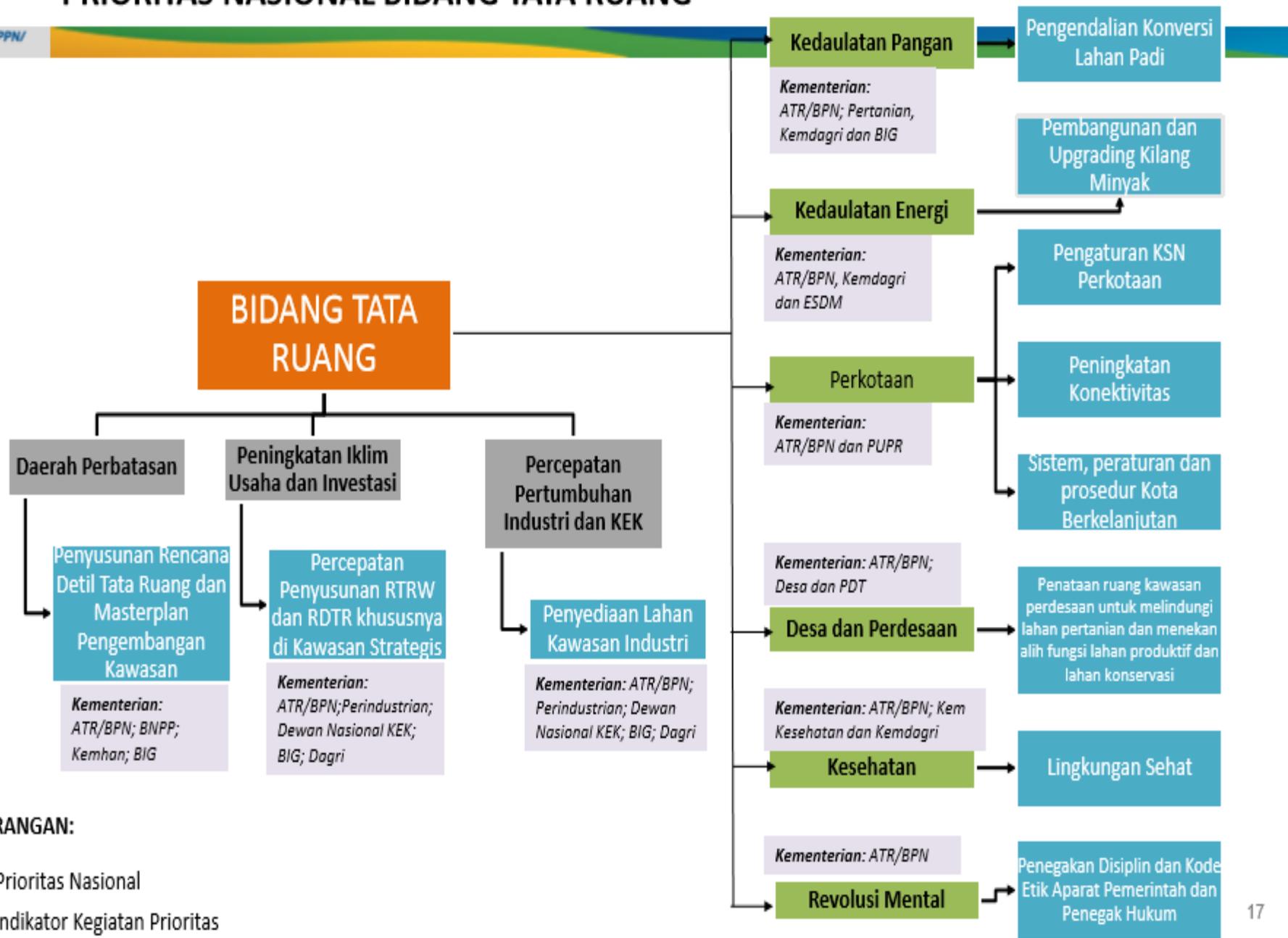


.....we are
 entering the
URBAN ERA



PRIORITAS NASIONAL BIDANG TATA RUANG

Kementerian PPN/
Bappenas



KETERANGAN:

- Prioritas Nasional
- Indikator Kegiatan Prioritas

Beberapa perubahan penting dalam pertumbuhan perkotaan/urbanisasi Global

- 1. Transformasi dari perdesaan ke perkotaan:** pada tahun 2008 secara global proporsi penduduk perkotaan melampaui penduduk perdesaan.
- 2. Kota-kota besar, kota raya dan megapolitan akan lebih banyak terdapat di negara-negara berkembang dari pada di Negara maju.**
- 3. Perubahan dari kota kecil ke kota menengah dan kota besar dan kota raya.** Kecenderungan pertumbuhan yang besar di Negara-negara terutama terjadi pada kota-kota menengah dan kota besar (berpenduduk lebih besar dari 500.000).

Beberapa perubahan penting... LANJUTAN

- 4. Aglomerasi/konurbasi kota-kota.** Kota-kota besar dan metropolitan semakin terhubung secara fisik-spasial dan fungsional membentuk sistem kota-kota/sistem perkotaan.
- 5. Kecenderungan perkembangan kawasan perkotaan secara ekspansif yang semakin jauh melampaui batas administrasi kota.** Kota-kota di Negara maju memasuki tahapan suburbanisasi, sementara di negara berkembang (Afrika dan Amerika Latin) terjadi proses **peri-urbanisasi**, dan **metropolitanisasi** bahkan mega-urbanisasi (Asia).
- 6. Kecenderungan keterserakan perkotaan (*urban sprawl*)** yang berdampaknya terhadap kebergantungan yang semakin tinggi pada kendaraan bermotor, serta penyusutan lahan pertanian dan ruang terbuka hijau di kawasan pinggiran/perdesaan.

Tantangan Perkotaan: Kini dan di Masa yang akan datang (UN-Habitat, 2009)

1. Tantangan demografis:

- Proporsi dan laju pertumbuhan penduduk perkotaan
- Masalah utama: kemampuan pemerintah untuk memenuhi penyediaan sarana-prasarana perkotaan

2. Tantangan lingkungan

- **Perubahan iklim:** dampak terhadap kota-kota wilayah pesisir
- **Dampak lingkungan dari penggunaan energi fosil** di kawasan perkotaan

PERMASALAHAN PERKOTAAN...



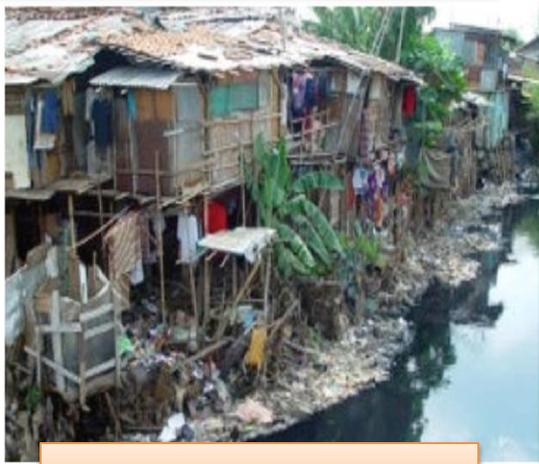
PERUBAHAN IKLIM



BANJIR



KRISIS AIR BERSIH



PERUMAHAN KUMUH

08/10/2017



POLUSI UDARA



KEMACETAN

3. Tantangan ekonomi

- Proses globalisasi dan restrukturisasi ekonomi
- Dampak terhadap pasar tenaga kerja perkotaan (polarisasi pertumbuhan kesempatan kerja dan struktur pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan di sektor jasa)

4. Tantangan sosio-spasial

- **Bentuk dan proses tata ruang baru**, yang pemicunya seringkali berada di luar kendali pemerintah daerah.
- Perubahan sosio-spasial yang mengarah pada **fragmentasi, pemisahan dan spesialisasi fungsi dan penggunaan lahan** di dalam kota

5. Tantangan institusional

Sistem perencanaan perkotaan formal , pemerintah lokal yang mempunyai kewenangan yang lebih besar.

Masalah Perkotaan di Indonesia (1)

→ Dalam konteks tata ruang dan ketimpangan regional:

- ❑ Masih besarnya **ketimpangan antar-wilayah** dalam hal pembangunan dan taraf hidup warga.
- ❑ Masih tingginya migrasi desa-kota yang diakibatkan oleh **ketimpangan desa-kota** (perbedaan kualitas hidup dan perbedaan kesempatan peningkatan kesejahteraan antara perdesaan dan perkotaan).
- ❑ Belum terwujudnya **hirarki dan tata peran kota-kota yang jelas** sebagaimana yang diatur dalam RTRWN (PKN, PKW, PKSN)
- ❑ **Urban sprawling** (pertumbuhan kawasan perkotaan yang meluas, kepadatan rendah, boros lahan/memakan lahan pertanian) yang sudah menggejala tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga kota sedang/menengah
- ❑ Keterbatasan **ruang publik** di perkotaan serta pemanfaatan ruang publik yang ada pun seringkali tidak sesuai dengan fungsi yang ada.

ISU PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI INDONESIA (2)

1. Masih belum terpenuhinya standar pelayanan minimum kota
2. Belum Optimalnya Penyediaan Perumahan, Prasarana dan Sarana Perkotaan
3. Meningkatnya masalah kemiskinan perkotaan.
4. Belum Optimalnya Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Perkotaan
5. Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Perkotaan
6. Rendahnya daya saing kota dan rendahnya ketahanan sosial dan lingkungan kota secara berkelanjutan.
7. Rendahnya kapasitas mitigasi bencana alam dan adaptasi terhadap perubahan iklim
8. Belum Efisiennya Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah perkotaan
9. Belum lengkapnya regulasi, pembiayaan dan kelembagaan yang khusus mengatur perkotaan
10. Belum optimalnya tata kelola pembangunan perkotaan di era otonomi daerah

Kecenderungan Perkembangan Kota di Indonesia (1)

Eksternal (perkembangan wilayah)

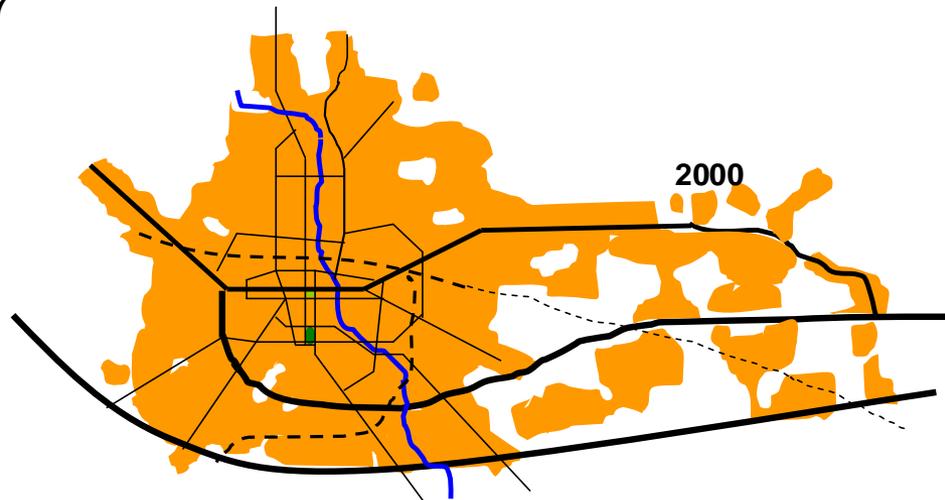
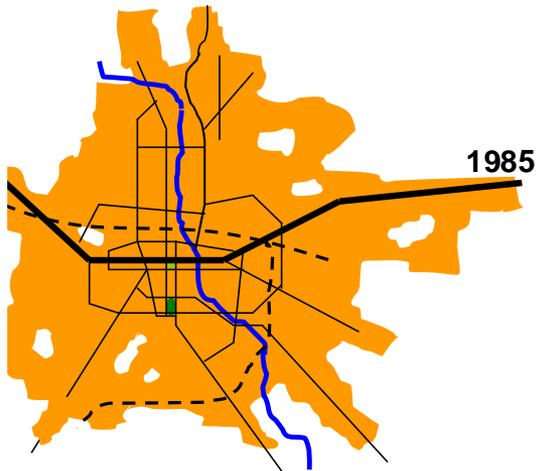
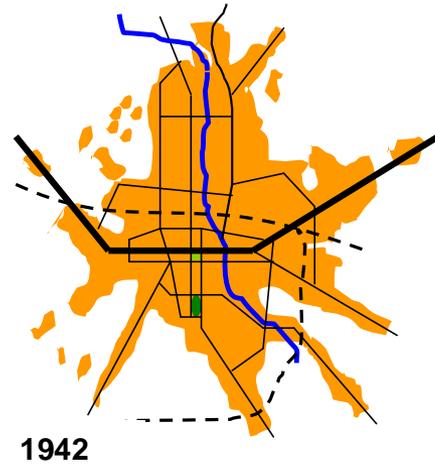
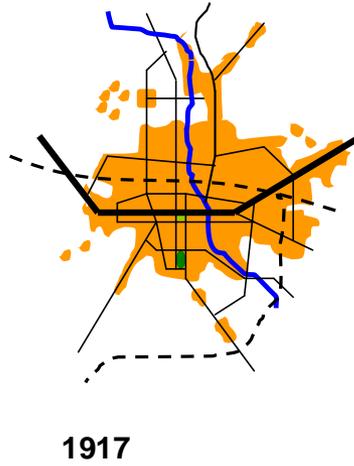
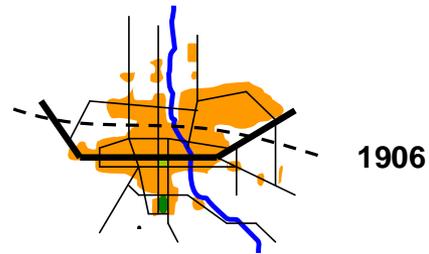
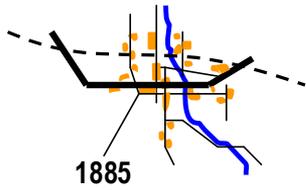
- Pergeseran kegiatan manufaktur dan industri dari wilayah kota
- Berkembangnya permukiman skala besar sebagai kota baru di dalam kota dan di wilayah sekitar kota
- Perkembangan kota-kota kecil dan menengah di wilayah metropolitan
- Peningkatan kebutuhan akan prasarana dan sarana perhubungan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk dan produk
- Beberapa kota besar berkembang menjadi pusat kegiatan yang bersifat global

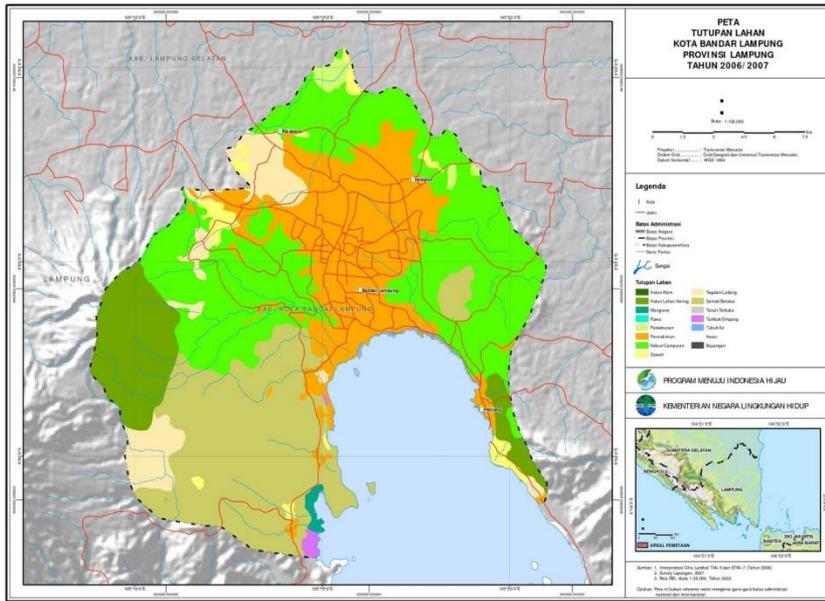
Kecenderungan Perkembangan Kota di Indonesia (2)

Internal :

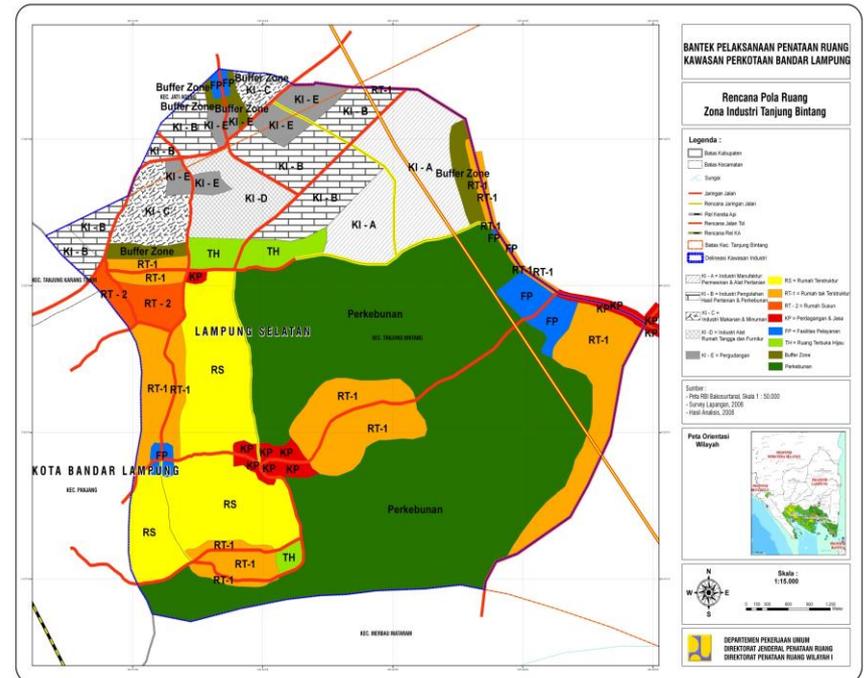
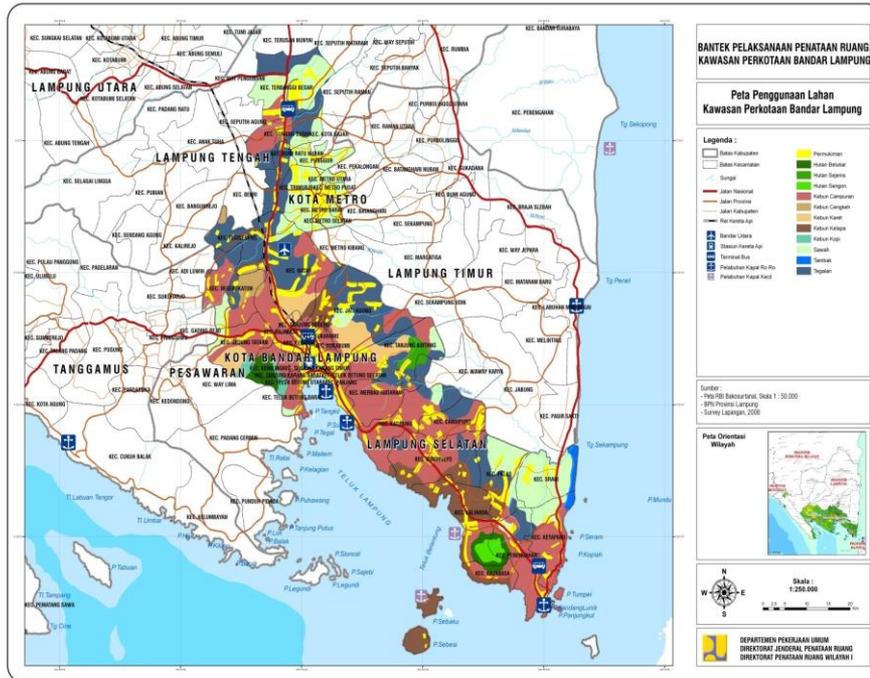
- Berkembangnya fungsi kota dalam sektor kegiatan jasa lokal, regional dan internasional
- Pergeseran pusat-pusat permukiman di dalam kota
- Efisiensi pemanfaatan lahan kota yang nilai dan harganya semakin meningkat menyebabkan berkembangnya pemanfaatan lahan yang sangat intensif
- Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi menuntut dikembangkannya prasarana perhubungan dan utilitas umum dengan teknologi pembangunan kota yang maju
- Sektor informal (PKL, dll) dan permukiman penduduk berpendapatan rendah (rumah kumuh) masih terdapat di dalam kota besar.

STADIA PERTUMBUHAN KOTA BANDUNG





Penggunaan Lahan Kota Bandarlampung



Dampak Pertumbuhan Perkotaan

- Peningkatan kebutuhan lahan (→ urban sprawl)
- Peningkatan kebutuhan sarana – prasarana perkotaan
- Perubahan pola penggunaan lahan
- Terlampauinya daya dukung lingkungan
- Perkembangan teknologi pembangunan kota
- Pemanfaatan berbagai sumberdaya alam secara berlebihan.

Dampak Perkembangan Fisik Kota

- Kewenangan hukum daerah untuk mengatasi tata ruang yang sangat luas
- Sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana kota
- Pembangunan sarana kota untuk menjawab kebutuhan perumahan, pengangkutan dan sarana sosial
- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota untuk mengatasi masalah yang berlangsung dalam masyarakat.

Rahardjo, 1985

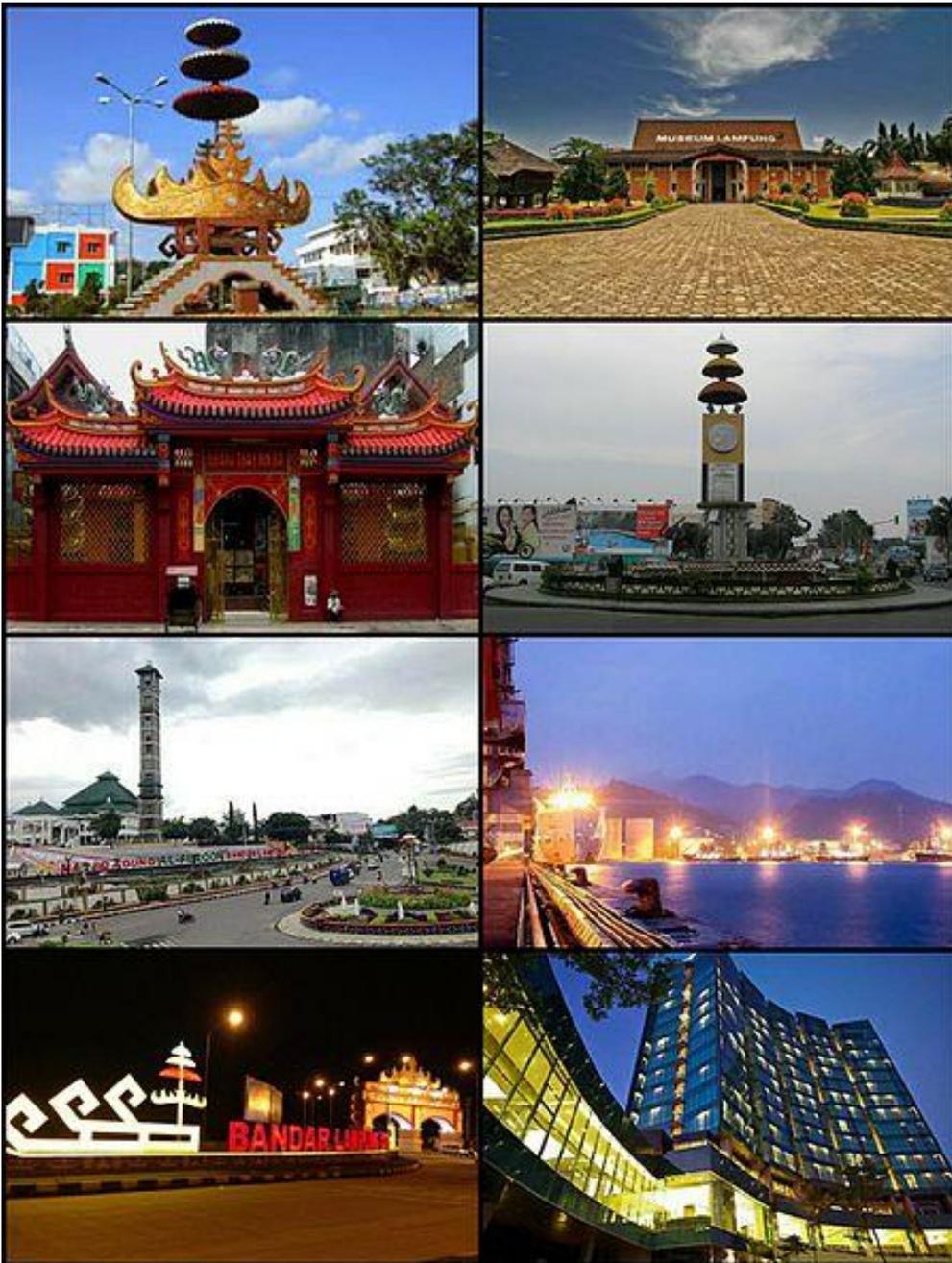
Tantangan Pembangunan Perkotaan

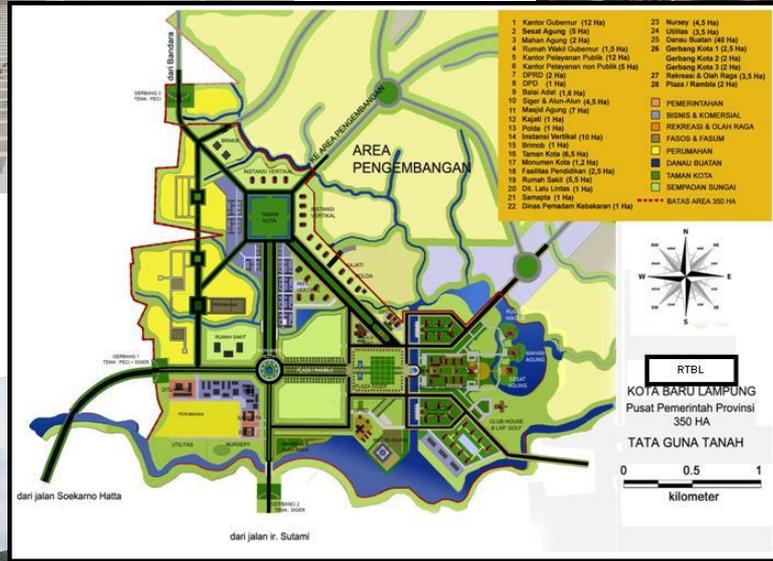
- 1. Persaingan global** menuntut kota agar mampu berperan sebagai tempat beraktivitas yang kompetitif dan bertaraf internasional.
- 2. Desentralisasi dan demokratisasi tata pemerintahan** yang menuntut peningkatan kapasitas teknis dan finansial kota, penguatan kerjasama antar kota maupun antara kota dengan daerah di sekitarnya, dan peningkatan peran pemerintah provinsi dalam mendorong pembangunan perkotaan.
- 3. Dampak perubahan iklim** seperti bencana alam, penyebaran penyakit endemik, gagal panen karena pola musim berubah, yang menuntut peningkatan daya dukung kota, kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan pengarusutamaan dampak perubahan iklim dalam pembangunan kota.



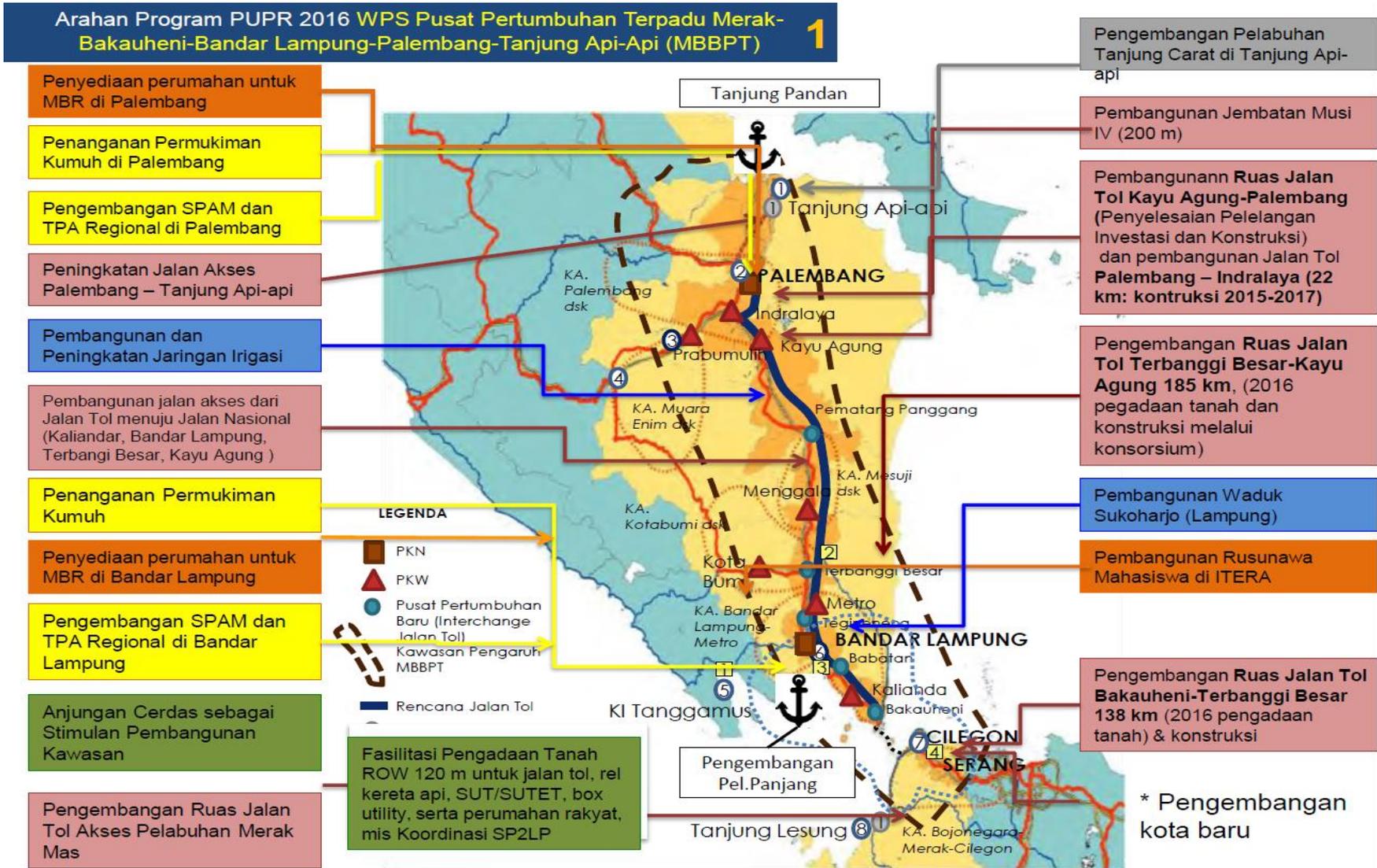
Kota-kota metropolitan,
tumbuh secara
ekspansif





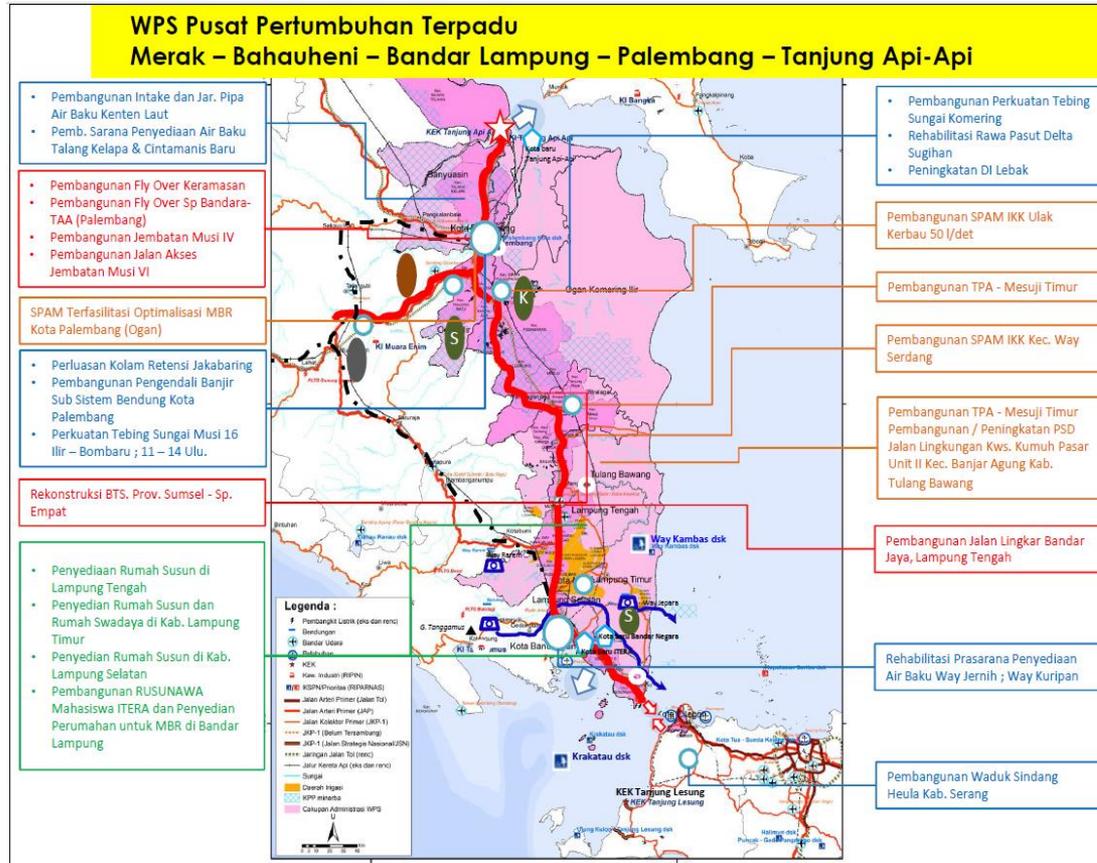


WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS – MBBPT



WPS 1: MERAK – BAKAUHENI – BANDAR LAMPUNG –PALEMBANG –TANJUNG APIAPI (MBBPT)

PROVINSI LAMPUNG DALAM RENCANA PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DAN KEWILAYAHAN NASIONAL



- Terkait dengan Provinsi Lampung, didalam konsep WPS terhubung dengan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu **Merak Bahauheni Bandar Lampung Palembang Tanjung Api Api (WPS MBBPT)**.
- Dalam WPS MBBPT pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut nantinya diharapkan akan berdampak kepada tingkat aksesibilitas Kota Metro ditinjau dari lajur koneksi Pulau Jawa, Bandar Lampung dan Palembang (Sumatera Selatan). Dampak lain yang bisa dirasakan adalah meningkatnya distribusi barang dan jasa, serta mobilitas penduduk maupun tenaga kerja di Kota Metro (Provinsi Lampung).

Urban expansion and loss of agricultural land

Alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis : Dampak pengembangan kawasan permukiman di pinggiran kota



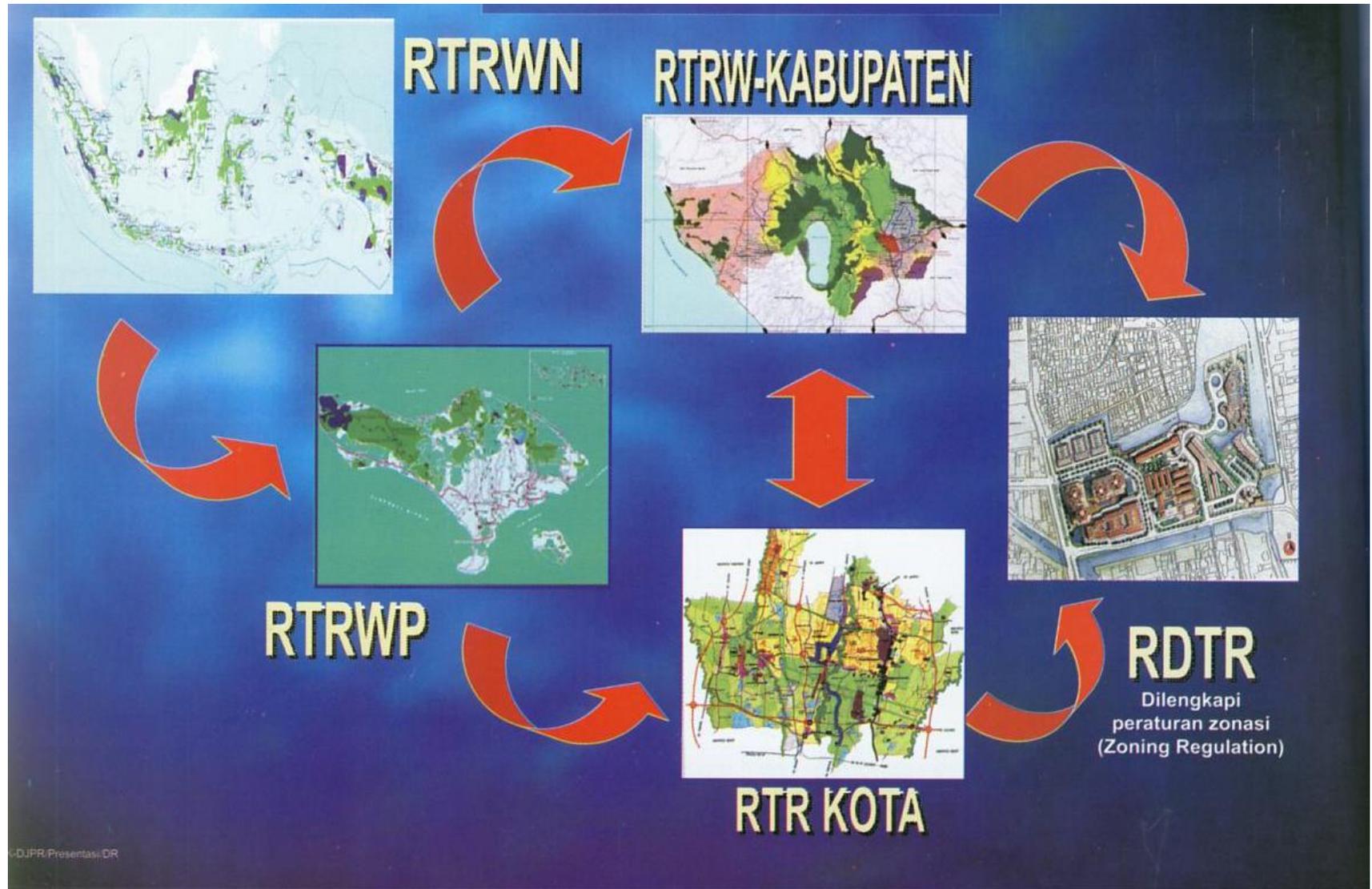
Pertumbuhan/Perkembangan kota vs Perencanaan Kota

- Perencanaan kota merupakan intervensi terhadap kecenderungan pertumbuhan kota
- Perencanaan kota : lebih bersifat **antisipatif** dari pada **reaktif** terhadap masalah perkotaan

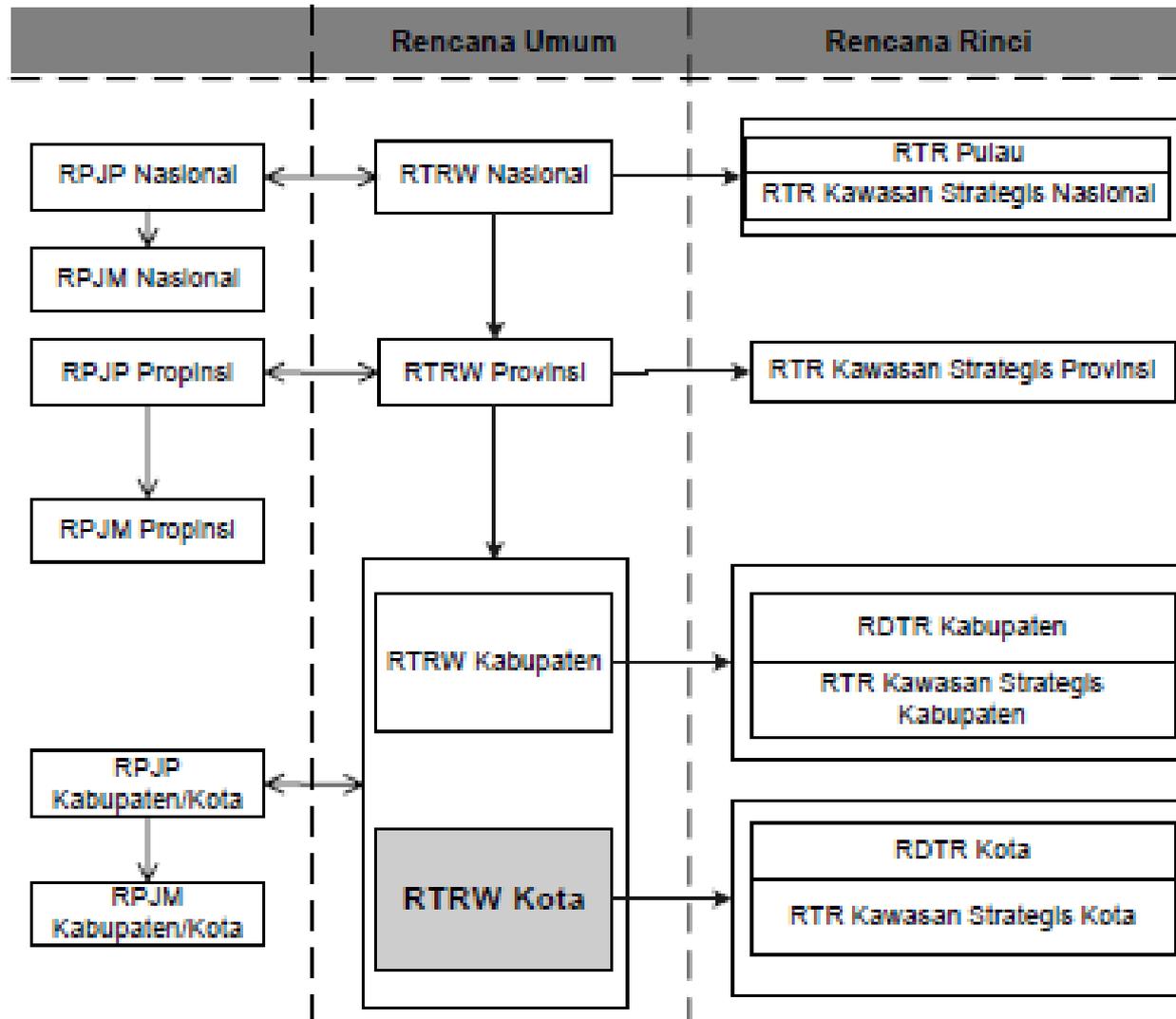
LINGKUP PERENCANAAN TATA RUANG

	RENCANA UMUM	Penetapan	RENCANA RINCI	Penetapan
Nasional	RTRWN	Peraturan Pemerintah	RTRW Pulau/Kepulauan RTR Kaw. Strategis Nasional	Peraturan Presiden
Provinsi	RTRWP	Perda Provinsi	RTR Kaw. Strategis Provinsi	Perda Provinsi
Kabupaten	RTRW Kabupaten	Perda Kabupaten	RDTR Kabupaten RTR Kawasan Strategis Kab.	Perda Kabupaten
Kota	RTRW Kota	Perda Kota	RDTR Kota RTR Kawasan Strategis Kota	Perda Kota

PRINSIP HIERARKIS DAN KOMPLEMENTER DALAM PERENCANAAN TATA RUANG



Kedudukan RTRW Kabupaten/Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan SPPN



Kedudukan rencana umum dan rencana rinci

- Kedudukan rencana umum dan rencana rinci dalam wilayah Kabupaten/Kota:
 - **Rencana umum tata ruang** merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan **pendekatan wilayah administratif**, yang dalam operasionalisasinya memanfaatkan rencana rinci tata ruang yang disusun dengan **pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan** dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan.
 - **Rencana rinci tata ruang** wilayah kabupaten/kota dan **peraturan zonasi** yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu **dasar pengendalian pemanfaatan ruang** sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Kebutuhan penyusunan RDTR

1. RTRW kab/kota belum dapat dijadikan acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci;
2. RTRW kab/kota belum dapat dijadikan acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. RTRW kab/kota belum dapat dijadikan acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang;
4. RTRW kab/kota belum dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).

Fungsi Rencana Detail Tata Ruang

1. Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW;
2. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
3. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
5. Acuan dalam penyusunan RTBL.

Manfaat RDTR

1. **Penentu lokasi** berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
2. **Alat operasionalisasi** dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
3. **Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang** untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan; dan
4. **Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan** untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau sub BWP.

Kriteria penyusunan RDTR

RDTR disusun apabila:

- RTRW kabupaten/kota dinilai **belum efektif sebagai acuan** dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena **tingkat ketelitian petanya** belum mencapai 1:5.000; dan/atau
- RTRW kabupaten/kota sudah **mengamankan bagian dari wilayahnya** yang perlu disusun RDTR-nya.

Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR

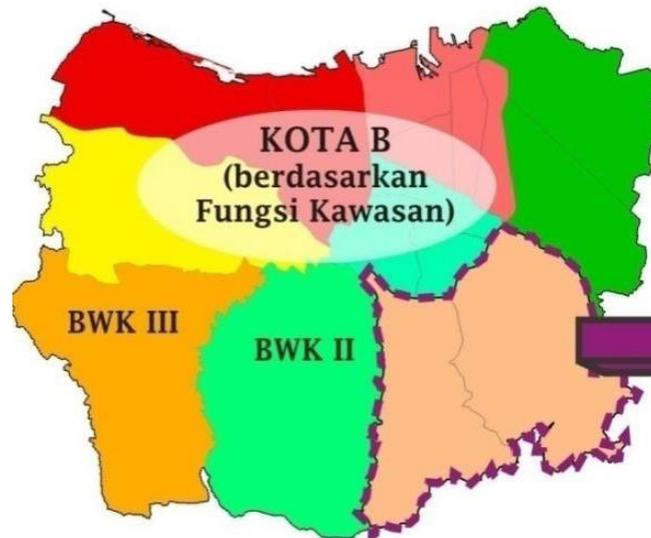
Wilayah perencanaan RDTR mencakup:

- a. wilayah administrasi;
- b. kawasan fungsional: bagian wilayah kota/subwilayah kota;
- c. bagian dari wilayah kabupaten/kota yang memiliki ciri perkotaan;
- d. kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan; dan/atau
- e. bagian dari wilayah kabupaten /kota yang berupa kawasan perdesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan.

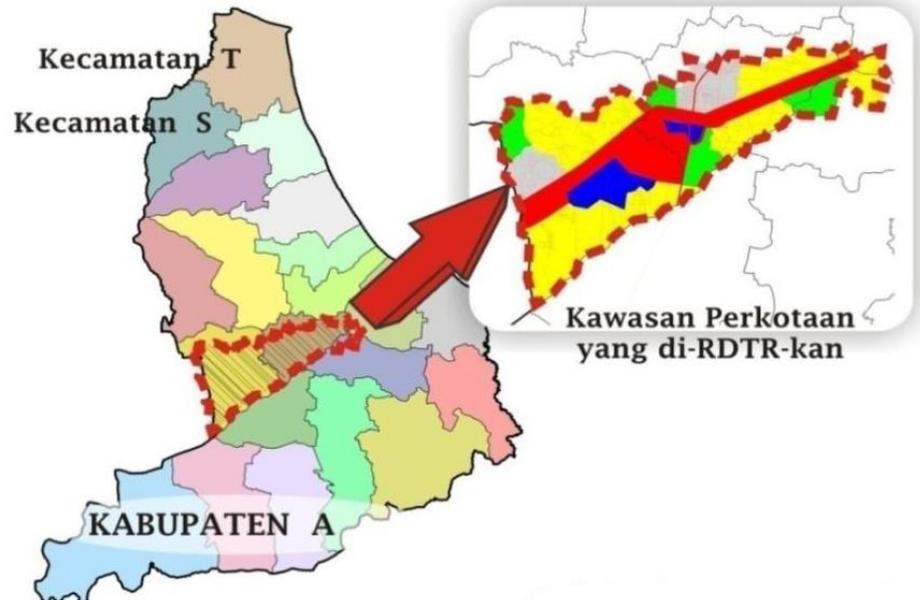
Lingkup Wilayah
RDTR Berdasarkan
**Wilayah
Administrasi**
Kecamatan dalam
Wilayah Kota



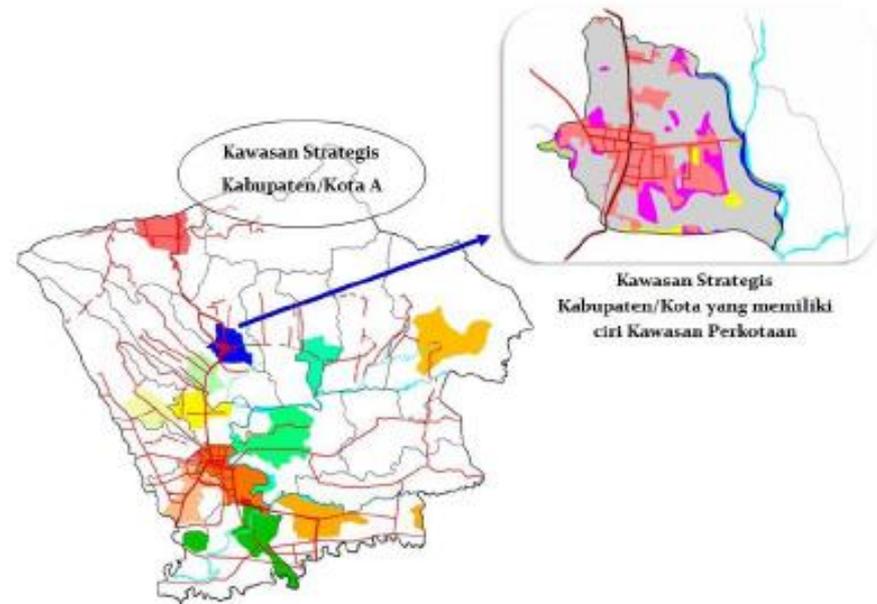
Lingkup Wilayah
RDTR Berdasarkan
**Kawasan
Fungsional** seperti
Bagian Wilayah
Kota/Sub Wilayah
Kota

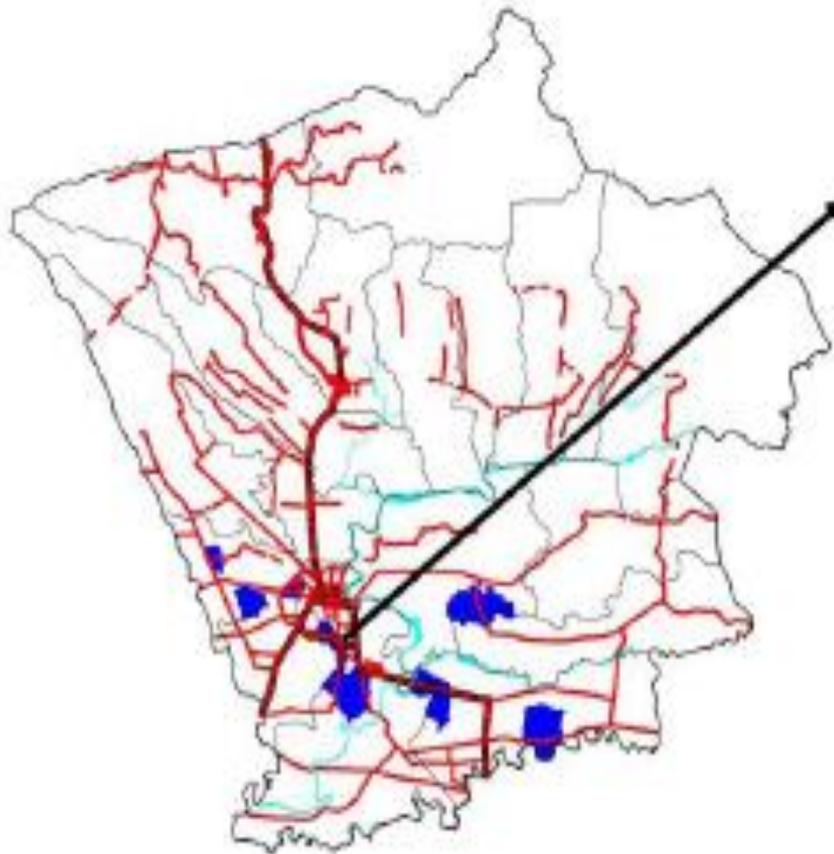


Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan **Bagian dari Wilayah Kabupaten** yang memiliki Ciri Perkotaan



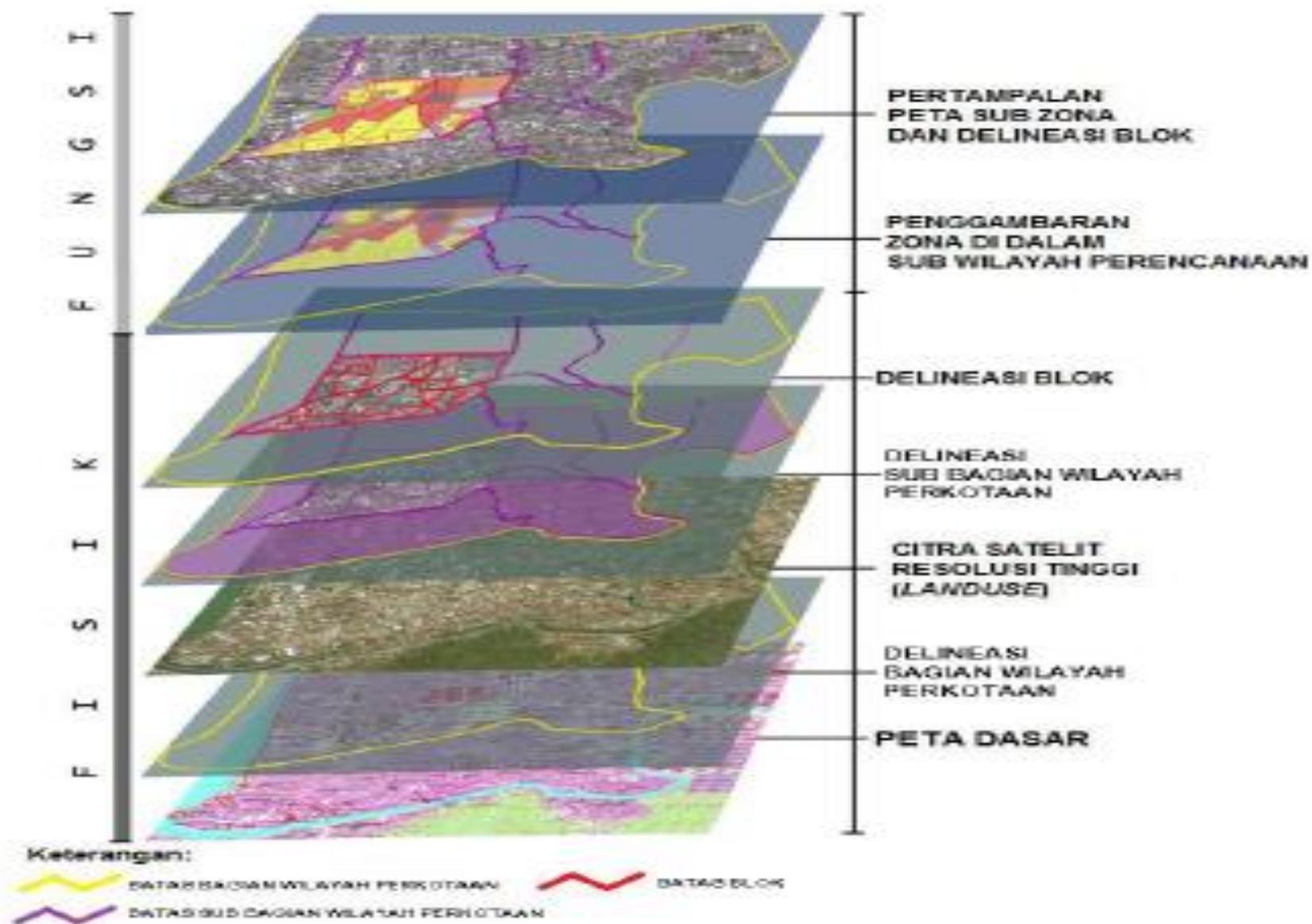
Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan **Kawasan Strategis kabupaten** yang memiliki Ciri Perkotaan





Bagian wilayah kabupaten/kota
berupa kawasan perdesaan yang
direncanakan menjadi kawasan
perkotaan

Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Berdasarkan Bagian dari Wilayah Kabupaten/Kota yang Berupa Kawasan Perdesaan dan direncanakan menjadi Kawasan Perkotaan



Gambar 2.1
Ilustrasi Pembagian BWP ke dalam Sub BWP

Persoalan dalam dalam penyusunan rinci (1)

1. Tingkat kerincian muatan RTR (rencana struktur dan rencana pola ruang)
2. Penerapan prinsip hierarkis-komplementer
3. Klasifikasi pola ruang/zonasi dalam rencana
4. Lingkup dan delineasi wilayah perencanaan
5. Perbedaan nomenklatur dalam rencana umum dan rencana rinci
6. Kaitan antara rencana tata ruang dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

Persoalan Penyusunan Rencana Rinci (2)

Perbedaan rencana umum dengan rencana rinci

- **Rencana umum tata ruang** merupakan rencana yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang yang dilakukan berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, yang secara berhierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP), dan RTRW Kabupaten/Kota
- **Rencana rinci tata ruang** merupakan penjabaran rencana umum tata ruang berupa rencana tata ruang kawasan yang penetapan kawasannya tercakup di dalam RTRW, sekaligus perangkat operasional dari rencana umum tata ruang
- **Rencana rinci tata ruang** terdiri atas:
 - RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Startegis Nasional
 - RTR Kawasan Strategis Provinsi
 - RDTR Kabupaten/Kota dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

VISI KSPPN tentang PEMBANGUNAN PERKOTAAN INDONESIA

KOTA MASA DEPAN **Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing** *untuk Kesejahteraan Masyarakat*

Kota Inovatif, Kreatif, &
Berbasis IT

Smart City

Kota Layak Huni,
Berkeadilan, dan
mengakui Keragaman

Liveable City

Kota Produktif, Hijau, &
Berketahanan Iklim

Green Economy City

Membangun IDENTITAS
PERKOTAAN INDONESIA berbasis
karakter fisik, keunggulan ekonomi,
budaya lokal

Membangun keterkaitan dan manfaat
antarkota dan desa-kota dalam SISTEM
PERKOTAAN INDONESIA berbasis
kewilayahan

KSPPN 2015-2045

KOTA MASA DEPAN

Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing



- Lingkungan
- Infrastruktur Kota
- Pendidikan
- Kesehatan
- Transportasi
- Sosial dan Budaya Hidup
- Keamanan



- Ruang Kota
- Lingkungan Kota
- Ketahanan Sosial, Teknologi, Pemerintahan
- Infrastruktur
- Perekonomian



- Perekonomian
- Sumber Daya Manusia
- Pemerintahan
- Infrastruktur
- Lingkungan
- Budaya Hunian

Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA berbasis karakter geografis keunggulan ekonomi, budaya lokal

Membangun keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa-kota dalam SISTEM PERKOTAAN NASIONAL berbasis kewilayahan

Kebijakan 15

Penerapan pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan

Strategi:

1. Menerapkan konsep kota padat lahan (*compact city*) dalam penataan ruang dengan memperhatikan karakter kota dan kegiatan penduduk kota;
2. Menetapkan aturan dan prosedur pemanfaatan ruang kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui *land use planning* dan *building regulation* sebagai dasar perijinan dan pemanfaatan lahan;
3. Menyediakan lahan kota untuk pelayanan kebutuhan masyarakat kota (bank lahan) serta meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan jaminan hukum hak atas tanah;
4. Mengembangkan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang kota;
5. Menerapkan instrumen perpajakan (insentif-disinsentif) untuk mengatasi pertumbuhan kota yang tidak terkendali.



KOTA

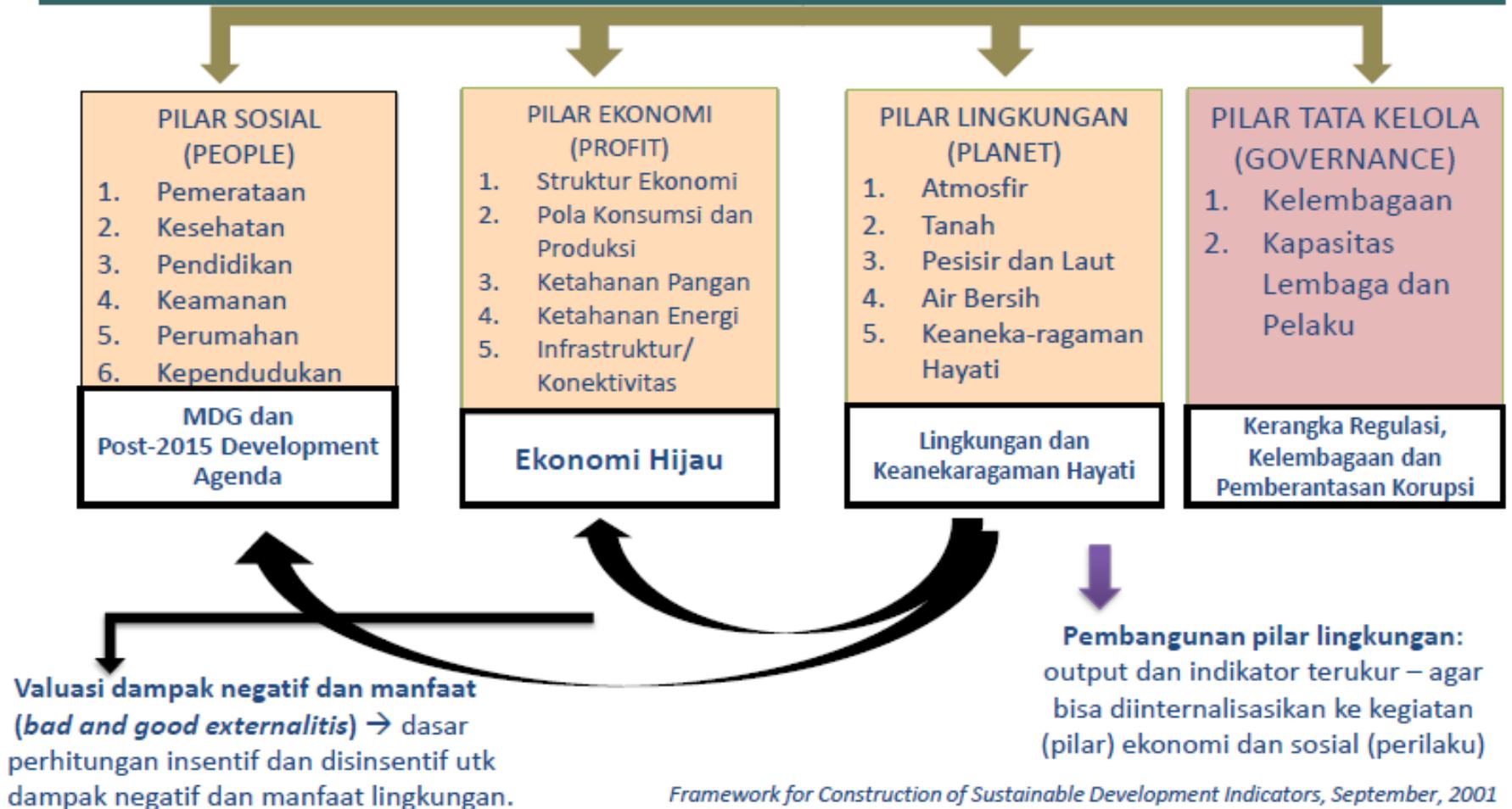
BERKELANJUTAN

Adalah kawasan perkotaan yang didesain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, lingkungan terbangun, dan lingkungan sosial;

1. PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN :

KESEIMBANGAN 3 PILAR PEMBANGUNAN DAN TATA KELOLA YG AKUNTABEL

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : *Bukan Lagi Pilihan, Namun Menjadi Keharusan*



Pilar 1:

Kota yang aman, nyaman dan layak huni

- Lingkungan Kota
- Pendidikan
- Kesehatan
- Transportasi
- Sosial
- Budaya Hidup
- Keamanan

Visi Pembangunan Perkotaan Nasional

Pilar 1: Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni

Kota yang dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup warganya sehingga dapat mencapai kesejahteraan dengan lebih mudah serta tetap mampu menjaga kualitas lingkungan kota;

Kota yang Aman	Kota yang Nyaman	Kota Layak Huni
<p>Stabilitas kota yang selalu terjaga dalam rangka memberikan pelayanan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat kota, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penegakan hukum;• Pencegahan kriminalitas dan konflik; dan• Pemberdayaan modal sosial masyarakat perkotaan;	<p>Kota yang dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup masyarakat perkotaan untuk mencapai kesejahteraan tanpa mengurangi kualitas lingkungan kota, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan prasarana sarana lingkungan hunian, ekonomi, kesehatan dan pendidikan• Prioritas penyediaan transportasi umum multimoda dan antarmoda, ruang bagi pejalan kaki dan pesepeda;	<p>Kota dengan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan kebutuhan hidup warganya yang mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota serta mampu menjaga kualitas lingkungan kota, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan prasarana sarana lingkungan hunian kota, ruang yang berkeadilan bagi pelaku ekonomi formal dan informal, kesehatan dan pendidikan;• Menjamin kualitas kesehatan lingkungan perkotaan

Pilar 2:

Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana

- Ruang Kota
- Lingkungan Kota
- Ketahanan Sosial, Teknologi, Pemerintahan
- Infrastruktur
- Perekonomian

Visi Pembangunan Perkotaan Nasional

Pilar 2: Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

Kota yang dibangun dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air, energi dan ruang kota yang memperhatikan dan menjamin kesehatan lingkungan kota serta menyinergikan lingkungan alami dan lingkungan buatan kota untuk dapat mengembangkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim, melalui:

- Penggunaan sumber daya terbarukan;
- Pemanfaatan infrastruktur hijau;
- Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan;
- Pengelolaan lingkungan;
- Perlindungan lingkungan perkotaan;



Pilar 3:

Kota cerdas dan berdaya saing berbasis teknologi dan ICT

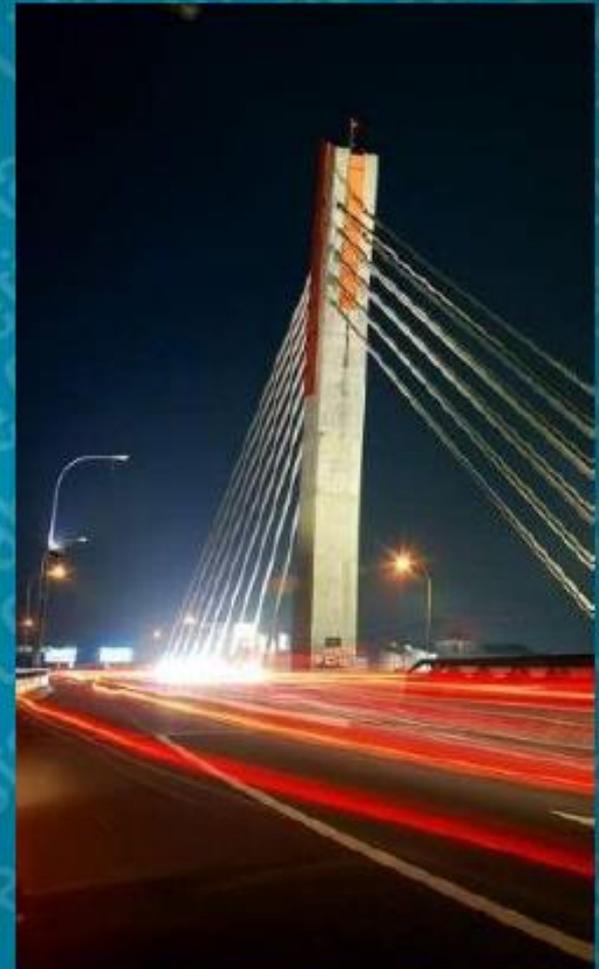
- Perekonomian**
- Sumber Daya Manusia**
- Pemerintahan**
- Infrastruktur**
- Lingkungan**
- Budaya Hunian**

Visi Pembangunan Perkotaan Nasional

Pilar 3: Kota Pintar dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan IT

Kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern (ICT) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, keunggulan ekonomi yang kompetitif serta kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui:

- Pengembangan ekonomi yang produktif, kreatif, dan inovatif;
- Tata kelola pemerintahan kota dan pelayanan publik;
- Kota yang memiliki pelayanan prasarana sarana hunian, kesehatan, pendidikan dan keamanan;
- Pengelolaan sumber daya lingkungan kota; dan
- Pembangunan masyarakat cerdas yang inovatif, kreatif, dan produktif;



Pilar 4: Membangun Identitas Perkotaan Indonesia Berbasis Karakter Fisik, Keunggulan Ekonomi dan Budaya Lokal

Memperkuat karakter perkotaan nasional dengan membangun ketahanan sosial-budaya yang memperhatikan keunggulan keanekaragaman hayati dan sosial budaya lokal, keunggulan geografis dan iklim tropis, serta memperhatikan bentuk kota dan bentuk fisik kota baik alami maupun buatan, melalui:

- Keunggulan ekonomi yang dimiliki suatu kota baik berasal dari faktor produksi maupun non faktor produksi, secara kompetitif sehingga mendorong daya saing suatu kota,; dan;
- Kota yang mampu mengelola dan mengangkat budaya masyarakatnya sebagai pencitraan kota dan untuk kepentingan lainnya sehingga mampu memberikan identitas berbeda;



Pilar 5: Membangun Keterkaitan dan Manfaat Antarkota dan Desa-Kota dalam Sistem Perkotaan Nasional Berbasis Kewilayahan

Mengurangi kesenjangan pembangunan, keterkaitan ekonomi antarkota dengan wilayah sekitarnya khususnya wilayah pedesaan, serta pembagian fungsi dan peran kota dalam sistem perkotaan nasional yang efisien, melalui:

- Hubungan timbal balik **antar kota** baik logistik, sumber daya, maupun tenaga kerja, dalam sistem perkotaan nasional yang dihubungkan melalui prasarana sarana;
- Hubungan timbal balik **antara kota dan desa** baik logistik, sumber daya maupun tenaga kerja dalam sistem keterkaitan kota dengan wilayah pedesaan yang terintegrasi;
- **Hierarki fungsi dan peran kota** dalam sistem pelayanan perkotaan nasional yang efisien dalam bentuk pusat-pusat kegiatan yang berbasis pada wilayah kepulauan;



PENUTUP

1. Penyusunan RDTR sangat dipengaruhi perkembangan kota baik internal maupun eksternal kota
2. Penyusunan RDTR hendaknya sesuai muatan yang rinci dan menggunakan peta yang sesuai skala standar penyusunan RDTR
3. Penyusunan RDTR harus memperhatikan konsep pengembangan kota yang berkelanjutan serta berdasarkan konsep pembangunan yang holistik, tematik, dan integratif)

Pustaka

1. Bappenas. 2014. *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional*
2. Ditjen Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum. 2010. *Status Perkembangan Perkotaan Indonesia 2010*.
3. Pontoh, N.K., I. Kustiwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Penerbit ITB, Bandung
4. Soegijoko, B.T.S. (ed), *Pembangunan Kota di Indonesia dalam Abad 21: Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, YSS-URDI, 2011
5. UN-Habitat, *Planning Sustainable Cities*, Earthscan, 2009.
6. UN-Habitat, *State of the World's Cities 2012/2013*, 2012
7. Bahan kuliah Dr. Iwan Kustiwan, ITB, 2014